

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu komponen penting PAD adalah retribusi daerah, yang berasal dari pungutan atas jasa atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sehingga efektivitas pengelolaannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah (Pratama, 2023).

Dalam konteks sektor perhubungan, retribusi meliputi berbagai jenis, antara lain retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, serta retribusi parkir. Jenis-jenis retribusi ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Perhubungan. Optimalisasi penerimaan retribusi di bidang ini penting karena berhubungan langsung dengan kelancaran transportasi, keselamatan lalu lintas, dan penyediaan sarana transportasi yang memadai. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi dari sektor perhubungan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib retribusi, lemahnya pengawasan, dan sistem pemungutan yang belum efisien (Azhari, 2024; Sopian & Maulidiana, 2023).

Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Sumatera Barat dalam periode 2011–2020 tidak stabil dan bahkan cenderung mengalami penurunan (Yuliana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa potensi retribusi daerah, termasuk di sektor perhubungan, belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi penerimaan retribusi yang cukup besar dari aktivitas transportasi dan perhubungan, terutama di wilayah yang padat aktivitas kendaraan dan pelayanan publik.

Secara khusus, UPTD Wilayah II Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memegang peran penting dalam pengelolaan retribusi perhubungan. Namun, hingga kini masih minim penelitian yang mengkaji efektivitas penerimaan retribusi pada unit tersebut secara komprehensif. Padahal, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas pemungutan retribusi, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan penerimaan retribusi yang dapat memperkuat PAD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Tinjauan Penerimaan Retribusi UPTD Wilayah II Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat” menjadi relevan dan signifikan untuk dilakukan

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja objek retribusi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat?
2. Berapa jumlah penerimaan retribusi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024?
3. Bagaimana prosedur pemungutan serta besaran tarifnya?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui objek retribusi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui jumlah penerimaan retribusi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024
3. Untuk mengetahui prosedur pemungutan serta besaran tarifnya

1.4 Manfaat Penulisan

- 1. Bagi Penulis**
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerimaan retribusi daerah, khususnya di sektor perhubungan.
 - b. Menjadi bekal akademis dan praktis dalam dunia kerja, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah atau pelayanan publik.
- 2. Bagi Instansi**
 - a. Membantu instansi dalam mengidentifikasi kendala serta potensi yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
 - b. Menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan sistem penerimaan retribusi yang telah berjalan, baik dari sisi prosedur, tarif, maupun kepatuhan wajib retribusi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi focus pembahasan di lokasi magang. Melalui cara ini penulis dapat memperoleh berbagai informasi yang relevan dan mendukung pelaksanakan kegiatan magang.

2. Studi Pustaka

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk memperkuat landasan teori dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Berdasarkan pertimbangan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah disusun, penulis memilih Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai dari hari Senin hingga Jumat sesuai dengan jam kerja yang berlaku di instansi tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini disusun ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang saling berkaitan dan membentuk

satu kesatuan kerangka penulisan dalam memahami permasalahan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, waktu dan tempat magang, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan mengenai objek penelitian yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Sejarah umum Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, serta gambaran operasi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelaah yang akan ditafsirkan supaya dapat mengetahui bagaimana hasil penulisan agar dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang dijelaskan.